

MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW DAN RELEVANSINYA BAGI PROVINSI SULAWESI BARAT.

Muhammad Ishak N¹, Rahayu², Muhammad Irvan Nur'Iva³, Herman⁴

¹Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar
Email: ishaknaja46@gmail.com

²Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra,
Universitas Negeri Makassar
Email: rahayu@unm.ac.id

³ Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar
Email: muh.irvan.nuriva@unm.ac.id

⁴ Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar
Email: hermandody@unm.ac.id

ABSTRACT

Waste management issues constitute a strategic agenda that requires a collaborative governance approach considering the number of actors involved, limited government capacity, and the importance of community engagement. This study aims to synthesize various collaborative governance models in the implementation of waste management policies in Indonesia and examine their relevance to strengthening waste governance systems in West Sulawesi Province. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) method based on the PRISMA protocol on scientific publications from 2010–2026 collected from reputable databases. The selection process resulted in 15 articles that met the inclusion criteria and were analyzed thematically. The findings show that the most widely applied collaboration patterns include Collaborative Governance, Public–Private Partnership (PPP), and Penta-Helix Collaboration. The implementation of these models contributes to improving waste service quality, expanding public participation, increasing funding efficiency, and fostering community-based innovation. Additionally, the government's role has shifted from a dominant actor to a facilitator and coordinator of cross-stakeholder collaboration. However, collaborative practices still face challenges such as weak institutional coordination, limited resources, sectoral ego, and suboptimal public participation. In the context of West Sulawesi, several governance issues highlight the importance of adopting a

more integrated and adaptive collaborative model. Therefore, this study recommends strengthening collaborative regulations, establishing multi-stakeholder forums, optimizing public-private partnerships, empowering communities, and utilizing digital technology as sustainable policy strategies.

Keywords: *collaborative governance, systematic literature review, public policy, waste management, multi-stakeholder partnership*

ABSTRAK

Permasalahan persampahan merupakan agenda strategis yang memerlukan pendekatan tata kelola kolaboratif mengingat banyaknya aktor yang terlibat, keterbatasan kapasitas pemerintah, serta pentingnya pelibatan masyarakat. Studi ini bertujuan menyintesis berbagai model *collaborative governance* dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia sekaligus menelaah keterkaitannya dengan penguatan sistem tata kelola persampahan di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA terhadap publikasi ilmiah periode 2010–2026 yang dihimpun dari sejumlah basis data bereputasi. Tahap seleksi literatur menghasilkan 15 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan selanjutnya dianalisis secara tematik. Hasil sintesis memperlihatkan bahwa pola kolaborasi yang paling banyak diterapkan meliputi *Collaborative Governance*, *Public-Private Partnership (PPP)*, serta *Penta-Helix Collaboration*. Implementasi berbagai model tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan persampahan, perluasan partisipasi publik, efisiensi pendanaan, serta tumbuhnya inovasi berbasis komunitas. Selain itu, terjadi perubahan peran pemerintah dari aktor yang dominan menjadi fasilitator sekaligus koordinator kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Meskipun demikian, praktik kolaborasi masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, ego sektoral, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Dalam konteks Sulawesi Barat, sejumlah persoalan tata kelola persampahan menegaskan pentingnya penerapan model kolaboratif yang lebih terpadu dan adaptif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi kolaboratif, pembentukan forum multipihak, optimalisasi kemitraan pemerintah-swasta, pemberdayaan komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai strategi kebijakan berkelanjutan.

Kata Kunci: *collaborative governance, systematic literature review, kebijakan publik, pengelolaan sampah, kemitraan multipihak*

1. PENDAHULUAN

Isu pengelolaan sampah menjadi perhatian utama dalam tata kelola lingkungan di Indonesia dan menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Kompleksitas persoalan persampahan tidak semata berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga menyangkut dimensi kebijakan, koordinasi kelembagaan, partisipasi warga, serta kontribusi sektor swasta. Dalam situasi tersebut, pendekatan *collaborative governance* dipandang semakin relevan sebagai strategi untuk mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintah sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sampah berbasis kolaborasi di sejumlah daerah di Indonesia melibatkan tiga aktor sentral, yakni pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat/komunitas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi regulator sekaligus fasilitator kolaborasi. Pihak swasta memberikan kontribusi melalui investasi dan dukungan teknis operasional. Di sisi lain, masyarakat berperan aktif dalam pengurangan sampah dari sumber melalui kegiatan komunitas dan pengelolaan bank sampah.

Bentuk kolaborasi tersebut terwujud melalui kemitraan operasional layanan publik, forum dialog multipihak dalam perumusan kebijakan, skema *public-private partnership* (PPP), serta pengembangan model kolaboratif inovatif seperti *penta-helix*.

Walaupun demikian, efektivitas *collaborative governance* masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Kendala yang sering muncul mencakup ego sektoral antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya pelibatan masyarakat. Sejumlah penelitian juga menilai bahwa kolaborasi yang terjalin kerap bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menghasilkan proses *co-creation* yang substantif di antara para pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kepemimpinan fasilitatif, kejelasan pembagian peran, serta konsistensi dukungan kebijakan.

Kondisi serupa juga ditemukan di kawasan Indonesia timur, termasuk Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai daerah yang tengah berkembang dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang meningkat, Sulawesi Barat menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kabupaten Polewali Mandar, Majene, dan Mamuju. Keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas pemrosesan akhir, serta dominannya pola *collect-transport-dispose* menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah belum sepenuhnya berkelanjutan.

Dari perspektif tata kelola, koordinasi antar perangkat daerah belum berjalan optimal, keterlibatan swasta masih terbatas, dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber relatif rendah. Program

berbasis komunitas seperti bank sampah belum berkembang merata, sementara dukungan pendanaan serta inovasi teknologi masih minim. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah di Sulawesi Barat masih cenderung bersifat birokratis dan terpusat pada pemerintah daerah sehingga potensi kolaborasi multipihak belum dimanfaatkan secara maksimal.

Padahal, pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* mampu meningkatkan kinerja layanan persampahan, mendorong partisipasi warga, serta menciptakan efisiensi pembiayaan melalui kemitraan pemerintah–swasta. Kolaborasi multipihak juga mendorong lahirnya inovasi lokal sekaligus memperkuat kelembagaan lingkungan di tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian sistematis untuk merangkum dan mensintesis berbagai model *collaborative governance* yang telah diterapkan di Indonesia sebagai bahan pembelajaran kebijakan (*policy learning*) bagi pengelolaan sampah di Sulawesi Barat. Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) digunakan guna mengidentifikasi pola kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat, serta model tata kelola yang paling sesuai bagi daerah berkembang. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan landasan konseptual sekaligus rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola persampahan berbasis kolaborasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan ilmiah terkait penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

2.1 Protokol Review

Proses penelusuran literatur mengikuti pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) untuk memastikan alur seleksi referensi berlangsung terstruktur, terbuka, dan konsisten.

2.2 Sumber Data dan Strategi Pencarian

Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah, yaitu Semantic Scholar, Google Scholar, PubMed, Garuda, dan DOAJ.

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: “collaborative governance” OR “tata kelola kolaboratif” AND “waste management” OR “pengelolaan sampah” AND “Indonesia”.

2.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi:

- ✓ Artikel ilmiah terbit pada rentang 2010–2026

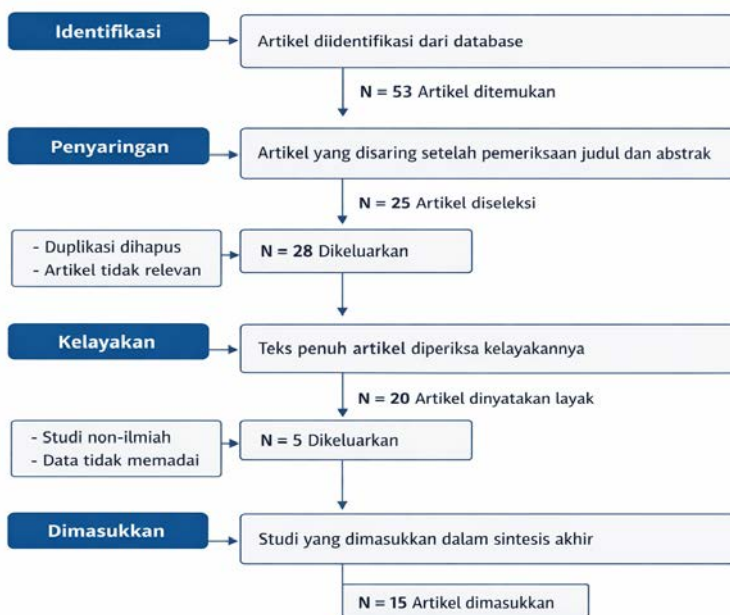
- ✓ Membahas *collaborative governance* dalam konteks pengelolaan sampah
- ✓ Penelitian dilakukan di Indonesia
- ✓ Artikel terindeks dan melalui proses *peer-review*

Kriteria eksklusi:

- ✓ Artikel non-ilmiah atau berbentuk opini
- ✓ Publikasi ganda
- ✓ Studi yang tidak berkaitan dengan kebijakan publik persampahan

2.4 Proses Seleksi Literatur

Sebanyak 53 artikel teridentifikasi pada tahap awal penelusuran. Setelah proses penyaringan judul dan abstrak, diperoleh 25 artikel yang relevan untuk ditelaah lebih lanjut. Tahap penilaian kelayakan teks penuh menghasilkan 20 artikel yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, 5 artikel dikeluarkan karena keterbatasan data serta ketidaksesuaian fokus kajian. Dengan demikian, total 15 artikel dimasukkan dalam sintesis akhir. Berikut alur pengelolaan pemilihan artikel.



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA Sumber: Data diolah Penulis (2026)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan 15 artikel dipilih maka penyajiannya dalam analisis Deskriptif Artikel. Hasil pemilihan artikel dengan menggunakan diagram alir PRISMA menemukan 15 artikel yang dapat dilihat pada table 1 di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 1. Ringkasan Karakteristik Studi yang Dianalisis

No	Nama Penulis, Tahun & Judul	Tujuan Penelitian	Metode & Sampel	Hasil	Temuan Utama	Kesimpulan
1	Agung Daniel Situmoran, 2025 <i>Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru</i>	Menganalisis collaborative governance serta faktor pendukung & penghambat pengelolaan sampah	Kualitatif deskriptif; wawancara, observasi, dokumentasi; pemda, swasta, masyarakat	Kolaborasi berjalan sesuai model Ansell & Gash namun terkendala sarana prasarana	Sinergi multipihak terbentuk tetapi kapasitas operasional terbatas	Kolaborasi efektif namun perlu penguatan SDM, infrastruktur & insentif lintas sektor
2	Andi Toappo Sawa Rifqi Hasan, 2025 <i>Collaborative Governance Pengelolaan Sampah DLH Kota Makassar</i>	Menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengelolaan sampah perkotaan	Kualitatif deskriptif; 11 informan; wawancara & observasi	Tata kelola kolaboratif berjalan namun belum optimal	Proses kolaboratif & desain kelembagaan baik; trust building lemah	Kolaborasi perlu penguatan kepercayaan & sinergi antar aktor
3	Cecep Zarkasih et al., 2025 <i>Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Cilamaya Wetan</i>	Menganalisis kolaborasi multipihak pengelolaan sampah tingkat kecamatan	Kualitatif studi kasus; pemda, masyarakat, stakeholder lokal	Kolaborasi sudah ada namun belum optimal	Hambatan utama: anggaran, koordinasi, partisipasi publik rendah	Penguatan partisipasi masyarakat & kejelasan peran aktor krusial
4	Suhendra Prabowo et al., 2025 <i>Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Pasar Kota Bandung</i>	Menganalisis tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah pasar tradisional	Kualitatif deskriptif; pemda, swasta, pengelola pasar, komunitas	Proses kolaborasi mulai terbentuk; pemerintah fasilitator	Kendala pada trust, komitmen sumber daya & kesepahaman	Kolaborasi efektif perlu komunikasi berkelanjutan & pemberdayaan komunitas
5	Windriyani M. Senaen et al., 2025 <i>PPP TPPAS Nambo sebagai Model Kolaborasi Regional</i>	Mengkaji PPP sebagai model kolaboratif pengelolaan sampah regional	Systematic literature review; analisis kebijakan & proyek	PPP meningkatkan kapasitas pengolahan sampah regional	Tantangan finansial & kesiapan operasional proyek	Adaptasi model PPP penting untuk efisiensi & keberlanjutan
6	A. Nabilla et al., 2025 <i>Hambatan & Strategi Implementasi Kebijakan Persampahan Nasional</i>	Memetakan hambatan & strategi implementasi kebijakan pengelolaan sampah	Systematic literature review; artikel 2015–2025	Hambatan: tata kelola, teknis, sosial	Strategi: sinkronisasi regulasi, koordinasi lintas sektor, pemberdayaan komunitas	Kolaborasi konsisten turunkan residu & dukung target SDGs

Model Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia: Systematic Literature Review dan Relevansinya bagi Provinsi Sulawesi Barat.

7	M. H. M. Zein et al., 2024 <i>Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Kota Ambon</i>	Mengevaluasi tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah daerah	Kualitatif deskriptif; pemda, KSM, masyarakat	Kolaborasi signifikan tapi terkendala SDM & fasilitas	Peran KSM & bank sampah tingkatkan partisipasi warga	Komitmen & transparansi penting untuk keberlanjutan kolaborasi
8	Sabarna & Ramdani, 2025 <i>Collaborative Governance Program “Mbah Dirjo” Yogyakarta</i>	Menganalisis faktor pendorong keberhasilan kolaborasi program reduksi sampah	Kualitatif; wawancara & observasi partisipatif	Kepemimpinan kuat dorong sinergi multipihak	Insentif & koordinasi efektif tingkatkan reduksi sampah	Sinergi stakeholder kunci keberhasilan pengelolaan sampah perkotaan
9	Muhammad Fadhlan, 2025 <i>Collaborative Governance in Indonesian Waste Management: A Systematic Literature Review</i>	Mensintesis literatur collaborative governance pengelolaan sampah Indonesia	Systematic literature review	Kolaborasi luas namun efektivitas terbatas	Hambatan: relasi kuasa timpang, institusi terfragmentasi, partisipasi lemah	Perlu co-creation nyata & kepemimpinan fasilitatif
10	Azka Fadhilah Khairunnisa (—) Pendekatan <i>Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Kota Bengkulu</i>	Menganalisis kolaborasi pemda–swasta–masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kualitatif deskriptif; wawancara & observasi	Kolaborasi berjalan baik namun terkendala sarpras & anggaran	Kurang armada angkut & kesadaran publik rendah	Upaya bersama cukup efektif atasi hambatan
11	Novita Arumsari et al., 2025 <i>Pentahelix Collaboration dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan</i>	Mengkaji kontribusi lima aktor pentahelix dalam pengelolaan sampah	Mini review literatur	Aktor pentahelix berperan komplementer	Tantangan: kesadaran publik, sumber daya, koordinasi	Pentahelix solusi komprehensif pengelolaan sampah berkelanjutan
12	Trio Saputra et al., 2025 <i>Dynamics of Collaborative Governance in Indonesian Sustainable Waste Management</i>	Mengeksplorasi perubahan model collaborative governance berkelanjutan	Studi kasus kualitatif; wawancara & dokumen	Model baru lebih inklusif & adaptif	Peran pemda bergeser jadi fasilitator & koordinator platform	Reformasi tata kelola kolaboratif tingkatkan keberlanjutan
13	Nurimna Fadliyah et al., 2021 <i>Implementasi Kebijakan Persampahan Berbasis Collaborative</i>	Mendeskripsikan implementasi kebijakan persampahan kolaboratif	Kualitatif; 5 informan; wawancara & observasi	Implementasi kolaboratif terlaksana baik	Komitmen antar lembaga & respon positif bank sampah	Komunikasi & dukungan sumber daya faktor kunci keberhasilan

	<i>Governance di Makassar</i>					
14	Abd. Rahman P, 2025 <i>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Polewali Mandar</i>	Mengevaluasi implementasi kebijakan persampahan daerah	Studi literatur kebijakan; model implementasi & collaborative governance	Kebijakan jelas namun implementasi belum optimal	Kendala: distribusi sumber daya, komunikasi, partisipasi	Perlu tata kelola kolaboratif & adaptif serta evaluasi partisipatif
15	Fatmawati et al., 2022 <i>Waste Bank Policy Implementation through Collaborative Approach</i>	Menganalisis implementasi kebijakan bank sampah berbasis kolaborasi	Kualitatif eksploratif studi kasus; Makassar & Bantaeng	Implementasi belum optimal terutama komunikasi & partisipasi	Kolaborasi stakeholder penting tingkatkan efektivitas program	Kolaborasi intensif tingkatkan partisipasi publik & swasta

Sumber: Hasil sintesis penulis (2026)

3.1 Gambaran Umum Studi

Hasil telaah sistematis menunjukkan bahwa studi mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Indonesia didominasi oleh pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada tingkat pemerintah daerah. Sejumlah penelitian juga memanfaatkan pendekatan SLR untuk memetakan dinamika tata kelola secara konseptual.

Sebaran lokasi penelitian mencakup berbagai wilayah seperti Makassar, Pekanbaru, Bandung, Yogyakarta, Ambon, Bengkulu, Karawang, hingga Polewali Mandar. Fokus kajian umumnya berkaitan dengan dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan, efektivitas implementasi kebijakan persampahan, faktor pendukung dan penghambat kolaborasi, serta model tata kelola kolaboratif yang kontekstual.

3.2 Model Collaborative Governance yang Diterapkan

Sintesis literatur menunjukkan keberagaman model tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah:

1. Model Collaborative Governance (Ansell & Gash)
Model ini paling dominan pada level kota/kabupaten dengan penekanan pada dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, serta kepemimpinan fasilitatif pemerintah daerah.
2. Public-Private Partnership (PPP)
Model PPP diterapkan pada proyek infrastruktur persampahan berskala regional melalui kerja sama jangka panjang antara pemerintah dan sektor swasta, terutama dalam pembiayaan dan penyediaan teknologi pengolahan.

3. **Penta-Helix Collaboration Model**
Model ini melibatkan lima aktor utama: pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media. Pendekatan ini menekankan jejaring inovasi lintas sektor untuk mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.
4. **Collaborative Governance Regime dan Model Hibrida**
Model kolaborasi adaptif yang menekankan kepemimpinan kolaboratif, insentif bersama, interdependensi aktor, serta integrasi platform kolaborasi multipihak.

3.3 Aktor dan Pola Kolaborasi

Seluruh studi menegaskan keterlibatan tiga kelompok aktor utama:

- **Pemerintah daerah:** regulator kebijakan, fasilitator kolaborasi, dan koordinator program
- **Sektor swasta:** penyedia teknologi, investasi infrastruktur, dan dukungan pembiayaan
- **Masyarakat dan komunitas:** pelaksana operasional dan agen perubahan perilaku pengurangan sampah

Pola kolaborasi meliputi kemitraan operasional layanan publik, dialog multipihak dalam perencanaan kebijakan, kontrak kerja sama pemerintah-swasta, jejaring komunitas partisipatif, serta platform kolaborasi berbasis digital.



Gambar 2: Pengelolaan Sampah Kalaboratif

3.4 Transformasi Peran Pemerintah

Hasil sintesis menunjukkan pergeseran paradigma peran pemerintah daerah: dari regulator dominan → fasilitator kolaborasi → koordinator platform multipihak.

Transformasi Peran Pemerintah
dalam Tata Kelola Sampah Kolaboratif



Gambar 3: Transformasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penegelolaan Sampah

Transformasi ini menandai perubahan pendekatan dari *government* menuju *governance* yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan adaptif.

3.5 Faktor Pendukung Kolaborasi (Enablers)

Beberapa faktor utama yang mendorong keberhasilan collaborative governance meliputi:

- Kepemimpinan fasilitatif pemerintah daerah
- Kepercayaan antar pemangku kepentingan
- Koordinasi lintas sektor yang efektif
- Dukungan regulasi dan kebijakan formal
- Skema pembiayaan inovatif melalui PPP
- Pemberdayaan komunitas dan bank sampah
- Pemanfaatan teknologi digital dalam koordinasi dan monitoring

3.6 Hambatan Kolaborasi (Barriers)

Hambatan yang paling sering dilaporkan dalam studi meliputi:

- Ego sektoral antar lembaga
- Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia
- Lemahnya koordinasi kelembagaan
- Rendahnya partisipasi masyarakat
- Kurangnya komitmen berbagi sumber daya
- Risiko tata kelola kontrak dalam PPP

- Kompleksitas koordinasi multiaktor
- Partisipasi simbolik tanpa kolaborasi substantif

3.7 Outcome Implementasi Kolaboratif

Penerapan collaborative governance memberikan dampak positif terhadap:

- Peningkatan efektivitas layanan pengelolaan sampah
- Penguatan partisipasi dan kesadaran masyarakat
- Efisiensi pembiayaan melalui kemitraan publik–swasta
- Inovasi model pengelolaan sampah berbasis komunitas
- Penguatan kelembagaan lingkungan daerah
- Dukungan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan

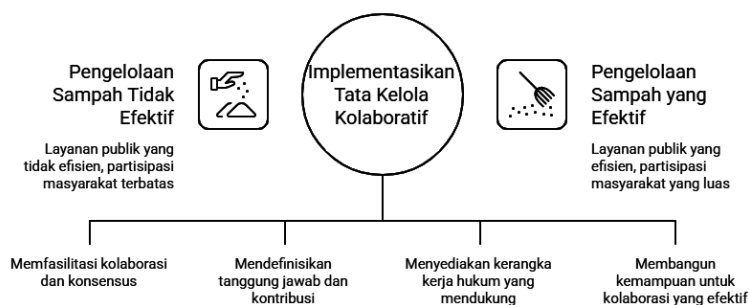
3.8 Kesenjangan Penelitian (Research Gaps)

Beberapa celah riset yang teridentifikasi:

- Minim studi kuantitatif evaluasi dampak kebijakan
- Kurangnya studi longitudinal
- Risiko kontraktual PPP belum banyak dikaji
- Kesenjangan kapasitas kelembagaan antar daerah
- Belum tersedianya model kolaborasi nasional baku
- Partisipasi masyarakat belum sepenuhnya inklusif

Model Konseptual Collaborative Governance

Meningkatkan Pengelolaan Sampah Melalui Tata Kelola Kolaboratif



Gambar 4: Model Konseptual Tata Kelola Kolaboratif Sampah

Secara keseluruhan, collaborative governance menjadi pendekatan dominan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Model kolaboratif terbukti meningkatkan efektivitas layanan publik, memperluas partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan sumber daya lintas sektor. Namun, keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kepemimpinan

fasilitatif, kejelasan peran aktor, dukungan regulasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

3.9 Relevansi dan Rekomendasi Kebijakan untuk Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan hasil sintesis tematik terhadap 15 artikel yang dianalisis, dapat diidentifikasi bahwa praktik collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Indonesia memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi empiris di Provinsi Sulawesi Barat.

Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah berkembang masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar dalam tata kelola persampahan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Pola pengelolaan yang masih didominasi pendekatan konvensional (collect–transport–dispose) menunjukkan belum optimalnya integrasi pendekatan kolaboratif lintas aktor.

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi collaborative governance di berbagai daerah sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif multi-aktor, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam konteks Sulawesi Barat, keterlibatan tersebut masih bersifat parsial dan belum terlembaga secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan transformasi tata kelola menuju model kolaboratif yang lebih adaptif dan kontekstual.

Dari sisi model, pendekatan Collaborative Governance (Ansell & Gash) relevan diterapkan pada level kabupaten/kota untuk memperkuat dialog, membangun kepercayaan, dan menciptakan komitmen bersama antar pemangku kepentingan. Sementara itu, skema Public–Private Partnership (PPP) berpotensi dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan dan teknologi, khususnya dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah regional. Selain itu, pendekatan Penta-Helix dapat menjadi strategi integratif untuk mendorong inovasi berbasis kolaborasi lintas sektor.

Lebih lanjut, temuan mengenai faktor pendukung (enablers) dan penghambat (barriers) memberikan dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan daerah. Hambatan seperti ego sektoral, lemahnya koordinasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat yang ditemukan dalam berbagai studi juga tercermin dalam kondisi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, intervensi kebijakan perlu difokuskan pada penguatan aspek kelembagaan dan sosial, bukan hanya teknis operasional.

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diadaptasi secara kontekstual di Provinsi Sulawesi Barat antara lain:

1. Penguatan regulasi daerah berbasis kolaborasi
Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang secara eksplisit mengatur mekanisme kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sampah, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab antar aktor.
2. Pembentukan forum kolaborasi multipihak

Forum ini berfungsi sebagai ruang koordinasi, komunikasi, dan perumusan kebijakan bersama antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media.

3. Pengembangan skema PPP dalam infrastruktur persampahan
Kemitraan dengan sektor swasta perlu diperluas untuk mendukung pembiayaan, teknologi, dan efisiensi layanan pengelolaan sampah.
4. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan bank sampah
Edukasi publik, insentif ekonomi, serta penguatan komunitas lokal menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber.
5. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM
Pelatihan terkait manajemen kolaborasi, tata kelola persampahan, serta kepemimpinan fasilitatif perlu ditingkatkan di tingkat pemerintah daerah.
6. Pemanfaatan teknologi digital
Sistem informasi persampahan berbasis digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, monitoring, dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
7. Pengembangan model kolaborasi berbasis lokal (context-specific model)
Model collaborative governance perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi Sulawesi Barat agar implementasinya lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil sintesis literatur tidak hanya memberikan gambaran konseptual, tetapi juga menawarkan arah kebijakan yang aplikatif bagi penguatan tata kelola persampahan di Provinsi Sulawesi Barat. Integrasi pendekatan kolaboratif secara sistematis diyakini mampu meningkatkan efektivitas layanan, memperluas partisipasi publik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

Implikasi Praktis

Implementasi rekomendasi ini berpotensi:

- Meningkatkan efektivitas layanan persampahan daerah
- Mengurangi timbulan sampah melalui partisipasi publik
- Memperluas pembiayaan dan inovasi teknologi
- Memperkuat tata kelola lingkungan berkelanjutan di Sulawesi Barat

4. KESIMPULAN

Hasil Systematic Literature Review menegaskan bahwa collaborative governance merupakan pendekatan strategis dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Model yang dominan meliputi Collaborative

Governance, Public-Private Partnership, Penta-Helix Collaboration, serta model hibrida yang kontekstual.

Pendekatan kolaboratif terbukti meningkatkan kinerja layanan persampahan, memperluas partisipasi publik, mendorong efisiensi pembiayaan, serta memacu inovasi berbasis komunitas. Transformasi peran pemerintah dari regulator tunggal menjadi fasilitator dan koordinator kolaborasi menjadi karakter utama tata kelola modern.

Namun demikian, efektivitas kolaborasi masih dibatasi oleh lemahnya koordinasi kelembagaan, ego sektoral, keterbatasan sumber daya, serta partisipasi publik yang belum inklusif. Temuan ini relevan dengan kondisi Provinsi Sulawesi Barat yang masih menghadapi tantangan tata kelola persampahan konvensional. Oleh sebab itu, penguatan model collaborative governance berbasis kemitraan multipihak menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari, N., et al. (2025). *Pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis pentahelix collaboration: A mini review*.
[https://sandbox:/mnt/data/dinahayatiputri.+3\)+Arumsari.+et+al.+Pengelolaan+Sampah+Berkelanjutan+Berbasis+Pentahelix+Collaboration+A+Mini+Review.pdf](https://sandbox:/mnt/data/dinahayatiputri.+3)+Arumsari.+et+al.+Pengelolaan+Sampah+Berkelanjutan+Berbasis+Pentahelix+Collaboration+A+Mini+Review.pdf)
- Dahlan, M., Al Yakin, A., & Pajammari, J. (2024). *Analisis kebijakan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar*.
<https://sandbox:/mnt/data/Jurnal%201.pdf>
- Fadhlan, M. (2025). *Collaborative governance in Indonesian sustainable waste management: A systematic literature review*.
[https://sandbox:/mnt/data/admin.+Collaborative+Governance-Muhammad+Fadhlan+\(1\).pdf](https://sandbox:/mnt/data/admin.+Collaborative+Governance-Muhammad+Fadhlan+(1).pdf)
- Fadliah, N., et al. (2021). *Implementasi kebijakan persampahan berbasis collaborative governance di Kota Makassar*. Tersedia pada:
https://sandbox:/mnt/data/Implementasi_Kebijakan_Persampahan_Berba.pdf
- Fatmawati, et al. (2022). *Waste bank policy implementation through collaborative approach: Comparative study of Makassar and Bantaeng, Indonesia*. *Sustainability*, 14(13), 7974.
<https://doi.org/10.3390/su14137974><https://sandbox:/mnt/data/sustainability-14-07974.pdf>
- Hasan, A. T. S. R. (n.d.). *Collaborative governance dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar*.
https://sandbox:/mnt/data/32.0881_ANDI%20TOAPPO%20SAWA_REPOST.pdf

- Khairunnisa, A. F. (n.d.). *Pendekatan collaborative governance dalam pengelolaan sampah Kota Bengkulu*.
<https://sandbox:/mnt/data/azka%20fadhilhh.pdf>
- Nabilla, A., et al. (2025). *Hambatan dan strategi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia: A systematic review*.
<https://sandbox:/mnt/data/8587.pdf>
- Prabowo, S., et al. (2025). *Collaborative governance dalam pengelolaan sampah pasar tradisional di Kota Bandung*. <https://sandbox:/mnt/data/4728-Article%20Text-9331-1-10-20251023.pdf>
- Rahman, A. (2025). *Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Polewali Mandar: Kajian atas tiga model implementasi kebijakan*.
https://sandbox:/mnt/data/RAMA_63002_07013682227012_0022016601_8826510016_0012057802_01_front_ref.pdf
- Sabarna, M. A. N., & Ramdani, R. (2025). *Collaborative governance dalam program reduksi sampah “Mbah Dirjo” di Yogyakarta*.<https://sandbox:/mnt/data/14408-Article%20Text-56865-55044-10-20250604.pdf>
- Saputra, T., et al. (2025). *Dynamics of collaborative governance in Indonesian sustainable waste management*.
<https://sandbox:/mnt/data/dynamics-of-collaborative-governance-in-indonesian-sustainable-waste-management.pdf>
- Senaen, W. M., et al. (2025). *Public–private partnership dalam pengelolaan sampah regional: Studi TPPAS Nambo*.
<https://sandbox:/mnt/data/5102-13483-1-PB.pdf>
- Situmorang, A. D. (n.d.). *Collaborative governance dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru*.
https://sandbox:/mnt/data/32.0153_Agung%20Daniel%20Situmorang_Repository.pdf
- Zarkasih, C., et al. (2025). *Collaborative governance dalam pengelolaan sampah: Studi kasus di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang*.
[https://sandbox:/mnt/data/68.+COLLABORATIVE+GOVERNANCE+DALAM+PENGELOLAAN+SAMPAH+\(STUDI+KASUS+DI+KECAMATAN+CILAMAYA+WETAN\)+KABUPATEN+KARAWANG.pdf](https://sandbox:/mnt/data/68.+COLLABORATIVE+GOVERNANCE+DALAM+PENGELOLAAN+SAMPAH+(STUDI+KASUS+DI+KECAMATAN+CILAMAYA+WETAN)+KABUPATEN+KARAWANG.pdf)